Efektivitas Kerjasama Antara Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Koto Sentajo

Yulia Nasfiza[1] Sri Erlinda[2] Supentri[3]
[1,2,3]Universitas Riau, Indonesia
E-mail: yulia.nasfiza2509@student.unri.ac.id, sri.erlinda@lecturer.unri.ac.id, supentri@lecturer.unri.ac.id

Article Info
Article History
Received: 2024-03-13
Revised: 2024-04-17
Published: 2024-05-01

Keywords:
Effectiveness;
Cooperation;
BUMDes.

Abstract
In a government, to build a developing or advanced region, good cooperation is needed. However, the village government and the Koto Sentajo village community lack cooperation in managing Village-Owned Enterprises (BUMDes). The aim of this research is to determine and explain the effectiveness of collaboration between the village government and the community in managing BUMDes and to determine the obstacles to collaboration between the village government and the community in managing BUMDes in Koto Sentajo village, Kec. Sentajo Raya District. Kuantan Singingi. This research uses a qualitative method with a descriptive approach and data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The research results obtained are that the form of cooperation between the village government and the community is still ineffective, the businesses that are being run are still underutilized by the village community. There has been no progress due to lack of interaction with the community to build a business. Every business has different obstacles that cause a business not to progress and not having a profit in running the business.

Artikel Info
Sejarah Artikel
Diterima: 2024-03-13
Direvisi: 2024-04-17
Dipublikasi: 2024-05-01

Kata kunci:
Efektifitas;
Kerja Sama;
BUMDes.

Abstrak
Dalam sebuah pemerintahan untuk membangun sebuah daerah yang berkembang ataupun maju diperlukan kerjasama yang baik didalamnya. Namun, pemerintahan desa bersama masyarakat desa Koto Sentajo kurang kerja sama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan efektif kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes dan untuk mengetahui kendala kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes di desa Koto Sentajo, Kec. Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan untuk teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bentuk kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat masih tidak efektif, usaha-usaha yang sedang dijalankan masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Belum adanya kemajuan karena kurangnya interaksi dengan masyarakat untuk membangun suatu usaha. Setiap usaha memiliki kendala yang berbeda-beda sehinggga menyebabkan tidak majunya suatu usaha dan tidak memiliki keuntungan dalam menjalankan usaha tersebut.

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Desa Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014, semua kewenangan tanggung jawab desa dibiayai dari sumber pendapatan seluruh desa. Agar aspek pemb angunan desa lebih merata dan berkeadilan, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. menetapkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini mendorong pemerintah pusat daerah gencar melakukan langkah-langkah untuk memaksimalkan potensi daerah agar dapat dikelola secara optimal. Oleh karena itu, ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang baru No. 6 Tahun 2014, yang menjadikan desa sebagai payung hukum baru otonomi desa dengan kekuasaan desa.

Masyarakat desa yang menginginkan suatu usaha, tetapi tidak ada jaminan BUMDes akan selalu berjalan seperti yang diharapkan, usaha apapun baik itu usaha maupun usaha jasa pasti ada masalah atau hambatan. Salah satunya adalah BUMDes, meskipun bertujuan untuk membantu perekonomian desa dan masyarakat, tidak menutup kemungkinan terdapat permasalahan pada BUMDes. Seperti yang dialami oleh

BUMDes di desa Koto Sentajo, BUMDes menghadapi beberapa permasalahan. Masalahnya adalah praktik bisnis pengelola BUMDes. Pegawai yang bekerja di BUMDes seringkali membuka dan menutup BRI Link dan tidak terikat dengan tempat kerjanya. Masalah lain yang membuat BUMDes berjalan dengan baik adalah pencatatan administrasi yang masih belum efektif. Selain itu BUMDes hanya merupakan usaha kecil-kecilan, karena tidak adanya kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam penyelenggaraan BUMDes. Melihat permasalahan BUMDes desa Koto Sentajo maka perlu dilakukan sosialisasi tentang kapasitas. melaksanakan program pada saat sosialisasi program, sehingga informasi tentang pelaksanaan program tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada peserta sasaran program. Koto Sentajo merupakan salah satu desa di Kecamatan Sentajo Raya, Wilayah Administratif Kuantan Singing, yang sebagian besar masyarakatnya bekerja dan bergantung pada hasil pertanian, perkebunan, buruh bangunan, pedagang dan nelayan. Oleh karena itu, kerjasama penting dalam bisnis BUMDes agar bisnis dapat dikelola secara optimal dan perekonomian warga desa Koto Sentajo dapat ditingkatkan. Bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, BUMDes dapat menjadi sumber penghasilan.

Kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam mengelola BUMDes desa Koto Sentajo, menyebabkan kegiatan desa saat ini tidak maksimal. Tentunya upaya tersebut membutuhkan kerjasama agar upaya tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Karena usaha yang diperlukan harus memenuhi kebutuhan masyarakat, karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan pendapatan desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat, menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan desa. Badan Usaha Desa (BUMDes) adalah masyarakat desa yang dikelola oleh masyarakat desa dan pemerintah desa untuk dapat memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Di Desa Koto Sentajo, BUMDes tidak berjalan maksimal dan upaya yang dilakukan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Perusahaan BUMDes di desa Koto Sentajo adalah: BRI- link dan budidaya. Kementerian Desa berencana mulai menggerakkan dan melaksanakan program BUMDes pada tahun 2016. Kewirausahaan desa merupakan salah satu solusi dari permasalahan desa yang ada. Kementerian Desa harus hati-hati mendorong pendirian BUMDes dan desa harus mempelajari apakah berhasil atau tidak, bukan hanya proyek yang dipimpin oleh segelintir orang atau sekadar memfasilitasi sekelompok orang, sehingga terjalin kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat. baik sangat penting dalam pengelolaan BUMDes, baik itu pengawasan maupun pendampingan, agar BUMDes dapat berfungsi secara efektif dan efisien.

Perlunya kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat penting, karena kewenangan desa merupakan hak desa untuk mengurus urusan desa itu sendiri. Kewenangan ini dapat diartikan pemerintah desa dan masyarakat sebagai unsur pemerintahan desa tanpa campur tangan pihak luar. Keahlian desa meliputi keahlian pengelolaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah desa dan masyarakat harus bekerjasama dalam pelaksanaan berbagai strategi, strategi ini penting agar pendistribusian potensi sumber daya yang ada di desa mendukung pelaksanaan pembangunan desa yang berkeadilan. Dimana tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, dan salah satu langkah pemerintah desa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa adalah pembentukan BUMDes.

Sebagai unit politik pemerintahan terkecil, desa memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Setiap dewan desa memiliki aturan untuk mengikuti sesuai peraturan pemerintah. Mengenai upaya percepatan pembangunan desa dengan menyediakan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa diharapkan menjadi program unggulan, pembangunan infrastruktur dan BUMDes menjadi salah satu pilihan dan BUMDes diharapkan menjadi hub ekonomi produktif yang diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai sarana kesejahteraan masyarakat yaitu mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sehingga dapat memberikan kontribusi ekonominya dan mengurangi pengangguran di desa. BUMDes lahir sebagai pendekatan baru untuk meningkatkan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes dikelola

sepenuhnya oleh masyarakat desa, atas nama desa, oleh desa dan untuk desa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa BUMDes memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga niaga desa. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia layanan sosial, sedangkan operasionalnya sebagai lembaga komersial berarti BUMDes berusaha mencari keuntungan dengan menawarkan sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar (Wijanarko, 2012).

Penyelenggaraan dan juga pemilikan modal BUMDes dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Gunawan (2011) menjelaskan munculnya BUMDes dengan tujuan untuk menerima kegiatan yang dibentuk menurut adat, kegiatan yang berdasarkan program pemerintah dan segala kegiatan lain yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat. Sayutri (2011) berpendapat bahwa keberadaan BUMDes diperlukan untuk menggerakkan potensi desa dan dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Hal ini juga didukung oleh Hardijono et al. (2014) bahwa pendirian BUMDes merupakan salah satu cara untuk membentuk perekonomian pedesaan yang mandiri untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pengelolaan BUMDes harus dilakukan sedemikian rupa sehingga BUMDes yang dibentuk dapat berfungsi sesuai dengan perannya. terbimbing dan profesional. BUMDes adalah solusi dari permasalahan desa. BUMDes diharapkan mampu mendorong dan mengelola perekonomian desa (Ramadana et al, 2013).

Menurut Dantika dan Yanuard (2013), tujuan awal pembentukan BUMDes adalah untuk mendorong atau menampung semua kegiatan yang menghasilkan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat dan budaya setempat, maupun kegiatan ekonomi yang dialihkan kepada masyarakat. Melalui program atau proyek pemerintah dan pemerintah daerah. Sebagai badan usaha desa diharapkan pembentukan BUMDes dapat memaksimalkan potensi masyarakat desa dari segi ekonomi, alam dan manusia. Penggerak kegiatan ekonomi desa diharapkan BUMDes yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial melindungi kepentingan masyarakat dengan berpartisipasi dalam penyediaan layanan sosial, sedangkan sebagai lembaga bisnis, BUMDes berupaya mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa. Kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes di desa Koto Sentajo, usaha usaha yang akan dilaksanakan perlu adanya kerjasama agar usaha yang akan dijalankan efektif. Banyak wacana usaha yang akan dibuat oleh pemerintah desa dan masyarakat koto sentajo tetapi untuk saat ini usaha yang sedang berjalan masih kurang baik.

Untuk itu perlu dilakukan penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mngetahui dan menjelaskan efektif kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pengelolahan BUMDes dan kendala kerjasama pemerintahan desa dan masyarakat dalam pengelolahan BUMDes Koto Sentajo.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan pada keabsahan data untuk keperluan pengecekan data maupun sebagai pembanding dari data tersebut. Triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu. Tempat penelitian di Desa Koto Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singing. Key informan berjumlah 8 orang, terdiri dari direktur BUMDes, Kepala Desa, Sekdes, Bendahara, BPD, Ketua Pemuda dan 2 orang Masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan menganalisa objek atau topik penelitian secara sistematis dan objek untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbentuk. Analisis data dikumpulkan oleh peneliti melalui seperangkat metodologi khusus, yang mana peneliti ingin mengetahui secara mendalam tentang Efektivitas kerjasama antara pemerintahan desa dengan masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

1. Bank Rakyat Indonesia (Bri Link)

PT Bank Rakyat Indonesia (Bri Link) Tbk Melakukan berbagai inovasi untuk menjangkau masyarakat dengan layanan perbankan. Salah satu inovasi yakni BRI Link melibatkan pihak ketiga (Agen) dalam pelayanan perbankan tersebut.

Gambar 1. Usaha BRI LINK

Bri Link sebagai Perluasan layanan BRI di mana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbangkan bagi masyarakat secara real-time online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep sharing fee.64 sharing fee Adalah pembagian fee Antara BRI dan agen beri Ling atas komisi dari transaksi BRI Link. Dan usaha BRI Link pada BUMDes koto sentajo berdiri pada tahun 2022, berdasarkan hasil rapat dengan pemerintah desa dan masyarakat. Kantor BRI link ini diresmikan pada 14 September 2022, awal mula modal usaha bri link ini 10.000.000 untuk keuntungan yang didapatkan setiap bulannya sekitar 150.000-200.000.

Untuk saat ini masih kurang dimanfaatkan oleh warga setempat untuk melakukan transaksi seperti taransfer pengisian pulsa dan pengisian token dikarenakan kantor BRI Link ini lokasinya jauh dari tempat keramaian sehingga usaha ini masih kurang efektif dalam menjalankannya. Sedangkan tujuann usaha mempermudah masyarakat dalam pelayanan jasa keuangan dengan aplikasi ayo ke BRI Ling BUMDes sumber berkah berbagai transaksi dengan mudah dan terpercaya bisa dilakukan.

2. Penggemukan Sapi

Usaha penggemukan sapi ini merupakan upaya untuk mengambil hasil dari pertambahan Bobot sapi secara optimal. Mengenai modal awal penggemukan sapi ini 5.000.000 keuntungan 34.000.000. Pembagian 60% untuk pengelola 20.000.000 40% untuk Bumdes 14.000.000 Jangka waktu yang diberikan untuk penggemukan sapi yaitu minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun. Jika dihitung keuntungan kasarnya saja bisa mencapai tiga sampai empat jutaan untuk sekali penjualan perawatannya.

Gambar 2. Usaha penggemukan sapi

Selain itu masih banyak yang belum mampu untuk meningkatkan produksi sapinya sehingga keuntungan yang didapatkan juga tidak bisa meningkat tahap awal untuk memulai usaha ternak kake itu membeli sapi dalam jumlah cukup banyak kurang lebih lima sampai 10 ekor sapi yang baru berusia sampai dua setengah tahun. Seharusnya, perlu persiapan matang untuk mendukung dalam percepatan penggemukan sapi sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar karena dari kotoran sapi bisa menjadi pupuk dan dapat dijual.

3. Budidaya Semangka

Budidaya semangka adalah usaha dalam bidang pertanian alasan BUMDes memiliki usaha semangka adalah mendapatkan dan meningkatkan pendapatan asli Desa. BUMDes koto sentajo menanam semangka merah, semangka kuning dan semangka Inul. Penanaman menggunakan dana desa TA 2022, salah satu bentuk usaha yang dijalankan sampai saat ini sehingga dua kali penanaman.

Gambar 3. Budidaya Semangka

Tetapi Panen yang pertama mengalami kegagalan karena curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan semangka semangka tidak berkembang dengan semua

angka pada umumnya sehingga panen tersebut gagal. Budidaya semangka ini ditanam di atas lahan kurang lebih 2 ha dengan bibit semangka yang disediakan 6.14 Bad Tang dengan lubang tanah sekitar 3500. Sedangkan jenis bibit yang ditanam berupa non biji dan bibit semangka Inul. Sedangkan pupuk yang digunakan memakai pupuk kandang sampai saat ini Sudah menghabiskan sekitar 350 karung pupuk kandang merupakan juga melakukan penyiksaan Penyeleksian buah dengan memakai bunga ketiga untuk menjadi buah dengan masa panen mulai dari penanaman memakan waktu sekitar 60 hari. Tujuan dari usaha ini adalah untuk meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat desa maupun dari Lumbung pangan desa meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga desa Koto Sentajo dan meningkatkan konsumsi pangan yang beragam.

4. Budidaya Kolam Ikan

Usaha Budidaya Kolam Ikan yang dikelola oleh BUMDes Koto Sentajo adalah Ikan Nila yang mana usaha tersebut diketuai oleh afrison. Mendirikan usaha kolam ikan ini salah satu unit usaha merupakan ikhtiar usaha untuk mewujudkan ekonomi yang mandiri, budidaya kolam ikan dibuat karena sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Untuk jenis kolamnya yaitu kolam tradisional, dimana keseluruhan material pembuatannya menggunakan tanah.

Gambar 4. Budidaya Kolam Ikan

Jenis tanah yang digunakan untuk membuat pematang kolam adalah jenis tanah liat biasa atau tanah liat berpasir. Untuk tinggi pematang kolam bisa disesuaikan dengan tinggi kolam atau kedalaman air kolamnya. Idealnya pematang bisa mencapai ukuran 20cm dari permukaan dasar kolam. Untuk ukuran kolam tergantung dari banyaknya benih yang akan dimasukkan, Untuk memulai budidaya dengan banyak bibit nila, antara 1.000-5.000 bibit, dibutuhkan modal Rp8-20 juta, tergantung dari penggunaan kolam budidaya, jenis pakan, dan biaya operasional lainnya. Modal usaha tersebut tetap dapat digunakan untuk bulan-bulan selanjutnya di luar pemasukan kotor dan bersih. Adapun modal yang dibutuhkan untuk membeli bibit nila sebanyak 1.000-5.000 bibit mulai dari Rp1,1-1,5 juta, tergantung dari panjang bibit yang di pilih. Idealnya, bibit nila terbaik memiliki panjang tubuh 7 cm. Sementara itu, harga ikan nila berkisar antara Rp30-50 ribu per kg. Anggap saja hasil panen yang didapatkan bisa mencapai 500 kg, apakah sudah terbayangkan berapa juta omzet yang akan didapatkan. Awalnya budidaya kolam ikan ini 2 petak dengan modal 10.000.000.

B. Pembahasan

1. Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Untuk usaha penggemukan sapi dari usaha penggemukan sapi ini masih mendapatkan keuntungan yang relatif rendah kurangnya perhatian dari pengelola penggemukan sapi sehingga sapi yang dipelihara tidak sehat dan menyebabkan harga jual sapi relative rendah untuk menanggulangi permasalahan ini perlunya kerjasama pengelolaan usaha penggemukan sapi ini agar sapi yang dipelihara terawat dengan baik dan omset penjulan sapi bisa meningkat. Dan untuk usaha budidaya kolam ikan yang mana usaha tersebut masih kurang efektif dalam pengelolaaannya disebabkan oleh kurangnya perhatian dalam hal kebersihan dan cuaca yang panas sehingga banyak ikan yang mati.

Dan pemilihan benih yang kurang bagus dan minimnya pengetahuan pengelola bumdes tentang probiotik vitamin dan obat untuk ikan. Sedangkan usaha Bri link yang mana usaha ini jauh dari pemukiman warga. Pengelolaan usaha Bri Link ini kurang efektif disebakan kurangnya semangat pengurus bumdes dalam mengembangkan usaha Bri Link ini sehingga usaha Bri Link ini tidak berjalan dengan semestinya. Terakhir usaha Budidaya

semangka usaha ini dikatakan kurang efektif karena kurangnya pemahaman tim pengelola tentang pengetahuan menanam semangka. Gagal panen sering terjadi pada budidaya semangka tersebut. Kurangnya perhatian dalam memelihara tanaman semangka membuat berbagai hama dan penyakit menyerang tanaman tersebut. Curah hujan yang tidak menentu juga menjadi alasan tim pengelola dalam budidaya tanaman semangka ini. Kendala-kendala Kerjasama Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan BUMDes. Memang setiap usaha yang dijalankan pasti ada kendala-kendala itu tergantung bagaimana cara pengelola mengatasinya agar suatu kendala tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap suatu usaha yang dijalankan dan tidak akan menghambat suatu usaha untuk mencapai suatu skeberhasilan suatu usaha. Serta perlunya mencari sumber daya alam sebelum suatu usaha dimulai agar suatu usaha tersebut bisa mendatangkan PAD bagi desa serta keuntungan tersebut bisa untuk usaha selanjutnya.

2. Kendala dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Kendala pada BUMDes Koto Sentajo adalah kurangnya kerjasama dalam pengelolaan usaha BUMDes tersebut sehingga masih kurang berjalan dengan baik. Kantor Bri Link yang terletak dikawasan hutan lindung yang mana kawasan tersebut tidak banyak penduduk yang tinggal disana. Lokasi yang tidak strategis dan kurang berfungsi menjadi penghambat usaha Bri Link. Untuk usaha penggemukan sapi dikarenakan minimnya gaji dalam pengelola penggemukan sapi membuat perawatan sapi tidak berjalan dengan lancar. Kurangnya perhatian pengelola dalam merawat sapi membuat sapi menjadi tidak sehat, karena tidak efektifnya dalam pengolahan. Pada usaha budidaya semangka dikarenakan curah hujan yang tinggi menyebabkan semangka jadi gagal panen.

Sedangkan usaha budidaya kolam ikan juga terdapat kendala dalam pengelolaannya, kurang bagus dalam pemilihan benih ikan serta pemberian makan yang menyebabkan pertumbuhan ikan yang seharusnya 3 bulan sudah bisa diperjual belikan tetapi dengan adanya kendala tersbut menyebabkan ikan tidak berkembang sesuai dengan pertumbuhannya dan pendapatan hasil yang tidak sesuai dengan modal dan tidak mendapatkan keuntungan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Efektivitas kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan bumdes masih kurang berjalan dengan baik karena kurangnya keterbukaan dengan masyarakat mengenai usaha BUMDes tersebut. Untuk pengelolaan BUMDes masih kurang efektif untuk usaha-usaha yang dijalankan masih kurang kerjasamanya dengan masyarakat. Tingkat efektivitas Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) di desa koto sentajo berada pada klasifikasi rendah, hal tersebut berdasarkan dari usaha-usaha yang dilakukan masih belum mencapai tujuan yang diinginkan dan untuk keuntungan belum ada. Serta tingkat perkembangan bumdes juga masih diklasifikasi rendah hal itu berdasarkan kurang nya kerjasama antara pemerintahan dan masyarakat dalam pengelolaan usaha-usaha tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, adapun beberapa saran untuk BUMDes Koto Sentajo kedepannya:

1. Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan agar usaha tetap berjalan dan lebih dikenal masyarakat.
2. Lebih mengembangkan setiap usaha yang ada
3. Untuk masyarakat lebih aktif dalam pengelolaan BUMDes
4. Pemerintahan desa lebih memberikan perhatian khusus kepada BUMDes berupa fasilitas mereka untuk membangun usaha.

DAFTAR RUJUKAN

Agunggunanto, E. A. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 13.

Dantika, Y. (2013). *Dampak Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.*

Farhani, A. H. (2008). Potensi Obyek Wisata Pantai Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. *Obyek Wisata Alam*, 24-25.

Fatmawati. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.* Makasar: Unismuh.

Gunawan, K. (2011) Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka menekan laju urbanisasi Widyatech. *Sains dan Teknologi*, Volume 10 no 3 April. Hardijono, R. &. (2014). Economic Indepedence of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes). *IOSR-JEF*, 3(2), 21-30.

La Suhu, B. D. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Government of Arcjipelago-Jgoa*, 1.

Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah.* Jakarta: Kencana.

Nugroho, R. D. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi.* Jakarta: PT.

Purwanto. (2018.). *Teknik Penyusunan Instrumen Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian Ekonomi Syariah (1nd ed).* Magelang: Staial Press.

Putra, A. S. (2015). Badan usaha milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. *Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RepublikIndonesia*, Vol. 7.

Ramada, C. B. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Sudi di Desa Landungsari, kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Administrasi Publik*, 1(6), 1068-1076.

Ridwan. (2014). Urgensi Badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pembangunan perekonomian desa. *Ilmu Hukum*, Vol. 8, No.3

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah*, 83.

Rismawati. (2018). Peranan BUMDes Perwitasari Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tampaksari Kecamatan Rowosari,Kabupaten Kendal

Sayutri, M. (2011). Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Potensi ekonomi Desa dalam upaya pengetasan kemiskinan di Kabupaten Donggala. *Academia Fisip Unted*, Vol.3 No 2.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods).* Bandung: Alfabeta